

**PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI ERA
PRESIDEN KAIS SAIED DI TUNISIA**



**Oleh:
Mohamad Fuat Najib
NIM: 21200012058**

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fuat Najib
NIM : 21200012058
Jenjang : Magister
Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Kosentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 November 2023

Saya yang menyatakan



Mohamad Fuat Najib

NIM. 21200012058

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fuat Najib
NIM : 21200012058
Jenjang : Magister
Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Kosentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2023

Saya yang menyatakan



Mohamad Fuat Najib

NIM. 21200012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1164/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Pembangunan Demokratisasi Era Presiden Kais Saied di Tunisia

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD FUAT NAJIB, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012058
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

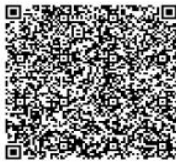


Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 658254b269995



Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 65824e73b1657



Penguji III

Dr. Moh. Mufid

SIGNED

Valid ID: 65850ce880db5



Yogyakarta, 12 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 65850e47e19f7

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukakn bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Harapan dan Hambatan Demokratisasi Era Presiden Kais Saied Di Tunisia.

Yang ditulis oleh:

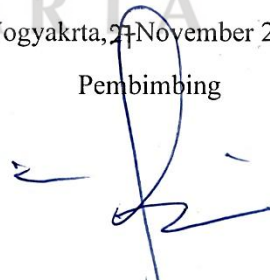
Nama : Mohamad Fuat Najib
NIM : 21200012058
Jenjang : Magister
Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Kosentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Interdisciplinery Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (MA).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 November 2023

Pembimbing



Dr. Subaidi, M.Si.

NIP: 197505172005011004

ABSTRAK

PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI ERA PRESIDEN KAIS SAIED DI TUNISIA: Tunisia merupakan negara yang berhasil melakukan transisi dan konsolidasi demokrasi dibandingkan dengan negara-negara kawasan Timur Tengah pasca peristiwa Arab Spring. Unsur-unsur demokrasi; pemilihan umum yang bebas dan adil secara berkala, jaminan terhadap kebebasan berkespresi dan pers dan keterlibatan masyarakat sipil dalam urusan publik mulai dirasakan di negara ini. Setelah pemilihan umum yang adil dan kompetitif di tahun 2019 dengan terpilihnya Kais Saied sebagai presiden, demokrasi di Tunisia berjalan sesuai dengan jalurnya. Namun, ketidakstabilan politik muncul setelah tindakan politik Presiden Saied yang mengeluarkan dekrit darurat pada 25 Juli 2021; dengan membubarkan parlemen, mengakhiri jabatan perdana menteri dan menguasai lembaga-lembaga pemerintahan. Tindakan Presiden Saied ini dinilai dapat menghambat pembangunan demokratisasi di Tunisia. Penelitian ini akan melihat bagaimana pembangunan demokratisasi, dilihat dari tindakan-tindakan Presiden Saied dan apa dampaknya terhadap demokrasi di Tunisia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan postmodernisme dalam melihat elemen-elemen yang membangun demokratisasi dan menggunakan teori demokrasi Robert Dahl di satu sisi dan di sisi lain akan melihat tindakan otoriter Presiden Saied dengan menggunakan teori otoritarianisme Levitsky dan Ziblatt. Juga menggunakan teori relativisme budaya Huntington dalam melihat struktur demokrasi di Tunisia yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis bagian-bagian dari tindakan politik Presiden Saied dalam proses demokratisasi di Tunisia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Tunisia dinilai berhasil dilihat dari pelaksanaan pemilu secara berkala, peran dan partisipasi masyarakat dan jaminan terhadap kebebasan berkespresi dan pers, yang dipengaruhi oleh unsur budaya dan agama di Tunisia. Namun, pembangunan demokratisasi di Tunisia mengalami stagnasi akibat tindakan-tindakan yang terjadi setelah Presiden Saied mengeluarkan dekrit seperti; penolakan terhadap sistem demokrasi, penguasaan terhadap media dan tindakan represif oleh keamanan yang berwajib terhadap para demonstran dan jurnalis, hal ini menunjukkan kemunduran prinsip-prinsip demokrasi di Tunisia yang mengarah pada tindakan otoriter. Dampak dari tindakan Presiden Saied menunjukkan kemunduran prinsip-prinsip demokratisasi di Tunisia setelah pencapaian yang diperoleh pasca Arab Spring.

Kata Kunci: Demokrasi, Otoriter, dan Saied.

MOTTO

Dalam menyerukan *Kebaikan*, bersikaplah kasar pada diri sendiri dan bersikap lembut pada orang lain.

Ahmad Mustofa Bisri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah, dengan setulus hati karya tesis ini ku persembahkan untuk diri saya sendiri dan kepada kedua orang tua saya.

dan

Kepada almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya curahkan kehadirat Allah Swt. Yang selalu memberikan rahmat, hidayah-Nya dan inspirasinya sehingga tesis ini dengan judul **Pembangunan Demokratisasi Era Presiden Kais Saied Di Tunisia** terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cinta dan kasihnya, serta yang selalu ditunggu keberkahan dan syafaatnya kelak.

Dengan senang hati saya ucapkan terima kasih kepada mereka, yang telah membantu, membimbing, mengarahkan serta mendiskusikan dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islami Negeri Sunan Kalija Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Subaidi, M.A., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menulis tesis ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi Interdisciplinary Islamic Studies, Kosentrasi Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepada kedua orang tua, yang selalu memberi dukungan dan doanya.

8. Kepada kekasih dan teman-teman saya yang telah memberikan support di kala males.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama menimba ilmu di program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Sebagai manusia yang tidak luput dari banyak kesalahan, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak terhadap tesis ini.

Yogyakarta, 27 November 2023

Saya yang menyatakan

Mohamad Fuat Najib

NIM. 21200012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINDAKAN POLITIK PRESIDEN SAIED DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI TUNISIA.....	26
A. Upaya Demokratisasi Presiden Kais Saied sebelum Dekrit 2021.....	26
B. Tindakan Presiden Kais Saied antara Harapan dan Hambatan dalam Proses Demokratisasi di Tunisia.....	31
1. Dekrit Presiden 25 Juli 2025.....	32
2. Tekanan terhadap kebebasan berbicara dan media pers.....	37
3. Referendum Konstitusi Baru.....	51
4. Pemilihan Umum Legislatif Desember 2022.....	58

BAB III PERGUMULAN PARADIGMA KLASIK DAN MODERNISME DI BAWAH PRESIDEN KAIS SAIED.....	67
A. PARADIGMA MODERNISME DI TUNISIA.....	68
1. Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat.....	70
2. Peran Masyarakat sipil.....	77
3. Jaminan kebebasan berekspresi dan pers.....	81
B. PARADIGMA KLASIK DI TUNISIA.....	85
1. Justifikasi Hukum dan Peradilan dalam Melawan Oposisi.....	86
2. Pengekangan Terhadap Media dan Represifitas Terhadap Kebebasan.....	95
C. PERGUMULAN WACANA KLASIK DAN MODERN DI TUNISIA.....	100
BAB IV PROSES DAN ALUR DEMOKRASI DI TUNISIA.....	114
A. Proses Demokratisasi di Tunisia.....	114
B. Alur Demokrasi di Tunisia.....	119
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus modernisasi dewasa ini ditandai dengan demokratisasi telah melanda negara kawasan Timur Tengah, antara lain Mesir, Libya dan Tunisia. Sistem demokrasi yang ciri utamanya pada kedaulatan rakyat dengan membuka ruang-ruang kebebasan serta struktur pemerintah yang dihasilkan melalui pemilihan umum bebas dan adil. Kawasan Timur Tengah yang sebelumnya menerapkan sistem pemerintahan monarki yang mengindikasikan otoritarianisme telah bertransisi menjadi sistem pemerintah yang demokratis di era modern ini. Transisi sistem demokrasi di kawasan Timur Tengah tidak bisa dilupakan dengan peristiwa revolusi di Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim otoriter Zine Abidin Bin Ali. Peristiwa tersebut disusul oleh Mesir dengan mundurnya Hosni Mubarak, dan Libya berhasil menggulingkan rezim diktator di bawah Muammar Gadaffi yang telah berkuasa selama empat puluh tahun.¹ Serta beberapa negara Arab lainnya seperti Yordania, Suriah, Bahrain dan Yaman. Hal tersebut merupakan pengaruh dari peristiwa revolusioner awal di Tunisia.

Peristiwa revolusi yang terjadi oleh masyarakat Arab umumnya disebut sebagai *Al-Rabi'u al-arabiyy*, sedangkan orang Barat menyebutnya dengan *The Arab Spring*.² Peristiwa revolusioner tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Arab yang sebelumnya berada di bawah rezim otoriter, dan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang demokratis. Mesir, misalnya, setelah *The Arab Spring*, setahun kemudian Mesir melakukan pemilihan presiden dengan terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden. Namun, setahun kemudian Mursi dikudeta oleh Dewan Agung Militer dan digantikan oleh Abdul Fattah Al-Sisi. Dari pergantian kekuasaan tersebut menandai kembalinya Mesir ke dalam

¹ Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), 1.

² Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), 21.

genggaman tangan-tangan Militer yang mengarah pada kediktatoran. Sedangkan Tunisia, juga bertransisi ke sistem demokrasi, dengan melakukan pemilihan umum presiden secara demokratis dan terpilihnya Moncef Marzouki dari partai Ennahda sebagai presiden. Dilanjutkan dengan pemilihan umum pada 2014 dengan terpilihnya Beji Caid Essebsi dari partai Nidaa Tounes dan pemilihan umum 2019 dengan terpilihnya Kais Saied dari non partai.

Usaha pembangunan transisi demokrasi di dunia Arab setelah *The Arab Spring* mengalami banyak tantangan dan menunjukkan setidaknya keberhasilan dalam penataan pembangunan demokrasi di Tunisia. Karena pasca revolusi, Tunisia mulai menerapkan reformasi politik dengan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil untuk memilih presiden dan parlemen. Keberhasilan demokrasi di Tunisia juga didukung oleh partisipasi masyarakat sipil, para aktivis, organisasi hak asasi manusia, dan media serta peran penting yang telah dilakukan kaum perempuan dan pemuda.³ Tunisia sebagai negara demokrasi perwakilan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti di negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Oleh itu, Tunisia dinilai sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan transisi demokrasi atas kerja cepatnya terhadap transisi pasca-revolusi dan perubahan politik menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah berjalan hingga saat ini.

Seperti yang telah didefinisikan oleh Juan Linz dan Alfred Stepan, Tunisia menyelesaikan transisi demokrasinya pada tahun 2011 ketika para elit sepakat untuk mengadakan pemilihan umum yang kompetitif untuk menghasilkan pemerintah dengan tingkat otoritas yang memadai.⁴ Stepan menulis di *Journal of Democracy* pada 2012 dengan pendapat bahwa yang tersisa di Tunisia adalah

³Sarah Yerkes, "Tunisia: Democracy in the Making", *Carnegie Endowment for International Peace*, (2018).

⁴ Juan Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 4.

demokrasi yang terkonsolidasi.⁵ Samuel Huntington, berpendapat bahwa Tunisia menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasikan pada akhir tahun 2014.⁶

Terpilihnya Saied sebagai presiden pada pemilihan umum 2019 merupakan bentuk dari dinamika demokrasi yang tengah dijalani negara Tunisia. Faktanya, kepemimpinan Saied banyak menuai kontroversial, ini bisa dilihat pada sikap Saied dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang kontroversial sehingga menimbulkan kekhawatiran akan mengancam pembangunan demokrasi di Tunisia. Saied pada 25 Juli 2021 telah mengeluarkan kebijakan darurat untuk membekukan kekuasaan dari Perdana Menteri dan anggota perlemen di Tunisia. Saied mengambil alih semua keputusan-keputusan legislatif dan politik. Dengan begitu tindakan yang telah dilakukan oleh Saied dapat mengancam pada pembangunan demokrasi yang sedang dibangun, karena telah mengambilalih kekuasaan parlemen dan perdana menteri yang merupakan representasi dari struktur demokrasi.

Saied sebagai seorang mantan profesor hukum tata negara mengeklaim tindakan dirinya telah sesuai dengan Pasal 80 Konstitusi Tunisia⁷, yang mengizinkan hak Presiden untuk mengambil tindakan darurat dengan mengambil alih fungsi kerja dalam situasi bahaya yang mengancam kemerdekaan negara dan fungsi normal negara selama tiga puluh hari. Namun Pasal 80 tersebut juga mengamanatkan agar dalam tindakan presiden tersebut harus melibatkan perdana menteri dan ketua parlemen untuk berkonsultasi dan parlemen tetap bekerja sesuai fungsinya bukan justru dibekukan. Untuk melindungi dari kebijakannya, Saied dilindungi oleh aparat keamanan, baik dari Militer dan juga Polisi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa tentara mungkin setia kepada Presiden Saied dan juga memiliki konsekuensi politik yang besar atas tindakannya.

⁵ Alfred Stepan, "Tunisia and the Twin Tolerations," *Journal of Democracy*, 23, no. 2 (2012): 89–103.

⁶Konsep ini berasal dari Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century* (Norman: Oklahoma University Press, 1991).

⁷ Tunisia's Constitutions of 2014

Tindakan yang telah dilakukan Saied dinilai sebagai tindakan pelanggaran terhadap konstitusi dan dapat memicu kemarahan atas batas-batasan kekuasaan eksekutif dalam sistem politik Tunisia yang tengah berkembang. Pasalnya, sistem pemerintahan Tunisia yang sedang membangun transisi demokrasi dewasa ini memerlukan kestabilan politik yang kuat demi menjamin reformasi politik dan kestabilan ekonomi tetap berjalan. Pembangunan demokrasi di Tunisia merupakan sebuah harapan besar di kawasan Arab, namun kebijakan Presiden Saied tersebut menjadi perdebatan dan menghambat perjalanan arah masa depan lembaga-lembaga yang mempresentasikan demokrasi di Tunisia. Rached Ghannouchi sebagai ketua parlemen juga sebagai ketua partai Ennahda menyatakan sikap mengecam keputusan Saied sebagai “kudeta melawan revolusi dan konstitusi”, langkah Ghannouchi juga diikuti oleh partai koalisi, seperti Partai Karama, Qalb Tounes dan Democratic Current dengan mengutuk tindakan Saied sebagai kebijakan yang inkonstitusional.⁸ Respon juga disampaikan oleh organisasi hak asasi manusia Amnesty International dengan mendesak Saied secara terbuka untuk berkomitmen menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.⁹

Dengan demikian, Tunisia tidak mudah dalam melalui transisi demokrasi serta mengalami banyak tantangan dan perjuangan sehingga memperlambat capaian demokrasi, membuat stagnasi dalam proses demokratisasi. Tunisia menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, keamanan dan kesehatan yang mengancam pada usaha pembangunan demokrasi. Ada sebuah definisi dari demokrasi yang hilang dari bagian penting demokrasi yang telah berjalan di berbagai dunia, yaitu tujuan dari dibentuknya pemerintahan yang demokratis adalah untuk memberikan perlindungan, kebebasan dan memajukan hak-hak, kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karenanya, demokrasi mengharuskan

⁸ Sharen Grewal, “Kais Saied’s Power Grab in Tunisia” dalam <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/26/kais-saieds-power-grab-in-tunisia/> diakses 19 Maret 2023.

⁹ “World reacts to Tunisia’s political turmoil” <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/26/world-reacts-to-tunisia-political-turmoil> diakses 20 Maret 2023.

masyarakat secara bebas untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam politik pemerintahan.

Menurut Hamrita, salah satu kebebasan utama yang baru saja diporeloleh oleh masyarakat Tunisia setelah Arab Spring adalah kebebasan berbicara.¹⁰ Karena dengan kebebasan berbicara ini memungkinkan masyarakat Tunisia untuk mengekspresikan ide dan pandangan mereka serta mengkritik mengenai isu-isu politik, ekonomi dan sosial. Namun pada kenyataannya, situasi politik yang buruk pada 2021 setelah Saied mengeluarkan dekret, hak berbicara patut untuk dipertanyakan kembali. Pasalnya pemerintah membatasi media pers yang mengekspresikan diri secara online. Sebagai contoh, polisi melakukan tindakan represif dengan menyerbu kantor Al-Jazeera yang dengan jelas ini merupakan melanggar kebebasan pers.¹¹ Pada kesempatan lain, ketidakstabilan politik berdampak pada aksi protes di bulan Januari 2021, polisi secara represif dengan menggunakan gas air mata untuk membubarkan masa aksi yang menyebabkan kematian terhadap seorang pengunjung rasa berusia 21 tahun serta yang lainnya terluka terkena tabung gas.¹²

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan Saied ini menandakan bahwa menurunnya prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun di Tunisia. Pembekuan parlemen dan pemecatan perdana menteri merupakan tindakan yang melemahkan fungsi partai politik. Tindakan represif keamanan negara terhadap beberapa media dan pengunjung rasa, yang merupakan bentuk pencapaian pasca Arab Spring berupa kebebasan pers. Menjadi sebuah problematika jika Tunisia masih dianggap sebagai negara yang demokratis seperti yang telah disampaikan

¹⁰ Mouna Hamrita, "Tunisian Post-Revolution Political Discourse: Freedom of Speech and Excess of Verbal Violence", *International Journal of Education and Research*, 4, no. 5 (2016): 379.

¹¹ Sharen Grewal, "Kais Saied's Power Grab in Tunisia" dalam <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/26/kais-saieds-power-grab-in-tunisia/> diakses 19 Maret 2023.

¹² Faten Ben Slimane, *10 Years After, Was Tunisia's Democratisations Successful*, (CEI_ISCTE University Institute of Lisbon, 2021), 42.

oleh Juan Linz dan Alfred Stepan dan banyak sarjana lain seperti M, Aman M.¹³ yang menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi di Tunisia ini diperjuangkan oleh peran dari partai politik dan masyarakat sipil, termasuk usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengubah konstitusi, memperbaiki sistem pemilu, dan meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Yerkes, S.¹⁴ melihat keberhasilan demokrasi di Tunisia juga didukung oleh partisipasi masyarakat sipil, para aktivis, organisasi hak asasi manusia, dan media. Dengan argumen tersebut tindakan Saied menunjukkan yang sebaliknya dengan membekukan parlemen presentasi dari partai politik dan meelakukan tindakan represif terhadap media dan pengunjuk rasa.

Dengan latar belakang tersebut, nampaknya pembangunan demokratisasi di Tunisia masih dalam pergulatan politik. Secara definisi umum dalam pembangunan demokrasi untuk mencapai keberhasilan demokrasi harus melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah. Demokratisasi di Tunisia mengalami banyak tantangan, dilihat dari ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi modernisasi dan pergulatan politik di dalam struktural pemerintahan. Peristiwa yang terjadi di Tunisia apakah akan menandai transisi demokrasi berubah menjadi model demokrasi yang lain atau berubah ke rezim politik yang tidak demokratis yang mengarah pada pintu kediktatoran. Peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang sedang terjadi di Tunisia dengan melihat apa saja faktor yang melatarbelakangi Presiden Kais Saied dalam mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan membekukan parlemen dan mencabut jabatan perdana menteri. Peneliti, juga menganalisis apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Saied akan berdampak menghambat demokrasi yang tengah berkembang di Tunisia atau akan menggantikan model demokrasi di Tunisia. Kasus tersebut dilihat dengan menggunakan teori demokrasi Robert E. Dahl dan menggunakan teori otoritarianisme Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

¹³ Aman, M. M, "The Evolution of Democracy in Tunisia: Prospects and Challenge," *Asian Social Science*, 11, no. 10, (2015): 5.

¹⁴ Arah Yarkes. "Tunisia: Democracy in the Making", *Carnegie Endowment for International Peace*, (2018).

Peneliti menggunakan teori demokrasi menurut Dahl untuk melihat demokratisasi dan tantangan-tantangannya di negara Arab. Menurut Dahl, terdapat delapan unsur elemen yang menjadi fondasi untuk membentuk sistem yang demokratis, karena di Tunisia sedang berupaya untuk mewujudkan unsur-unsur tersebut. Dari teori demokrasi tersebut akan membantu menganalisis dinamika demokrasi yang terjadi di Tunisia. Sedangkan teori otoritarianisme menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt digunakan untuk melihat indikator yang dapat mengidentifikasi kemungkinan kembalinya otoritarianisme di suatu negara yang sebelumnya demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dengan objek fokus penelitian pada dinamika perkembangan demokrasi di masa Presiden Kais Saied, dengan begitu peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pembangunan demokratisasi di Tunisia?
2. Tindakan apa saja yang telah dilakukan Presiden Kais Saied dalam proses demokratisasi di Tunisia?
3. Apa dampak dari kebijakan Presiden Kais Saied terhadap proses demokratisasi di Tunisia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pembangunan demokratisasi di Tunisia sejak Arab Spring hingga masa Presiden Kais Saied.
2. Penelitian selanjutnya bertujuan untuk mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan Presiden Kais Saied dalam proses demokratisasi di Tunisia.
3. Berikutnya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana dampak dan arah demokratisasi di Tunisia pada masa Presiden Kais Saied, dilihat dari

tindakan yang telah dilakukan itu akan mendorong atau menghambat demokratisasi di Tunisia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini akan berfokus pada proses demokratisasi di Tunisia pada masa Presiden Kais Saied dengan beberapa tindakan kontroversial yang dapat menghambat pembangunan demokratisasi di Tunisia seperti, membekukan Parlemen dan Perdana Menteri, juga tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam aksi protes Januari 2021 yang berakibat pada meninggalnya seorang pengunjuk rasa. Dengan begitu apakah keputusan Kais Saied ini merupakan sebuah ancaman bagi negara Tunisia yang sedang membangun demokrasi.
2. Secara teoritis penelitian ini akan melihat bagaimana dinamika pembangunan transisi demokrasi di Tunisia dengan banyaknya tantangan dan kebijakan yang inkonstitusional yang diumumkan Kais Saied.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti membaca kajian atau penelitian yang serupa dengan objek baik itu bersifat formal maupun matrial. Tulisan-tulisan yang membahas mengenai negara Tunisia dan juga perkembangan demokratisasi. Keberhasilan demokratisasi di Tunisia didukung oleh banyak faktor-faktor seperti, dari partisipasi dari masyarakat, upaya memperbaiki lembaga-lembaga demokratis segera pasca Arab Spring, dan memberikan ruang-ruang kebebasan berekspresi dan pers. Penelitian-penelitian sebelumnya di bawah ini umumnya membahas mengenai keberhasilan demokratisasi di Tunisia.

Keberhasilan demokratisasi di Tunisia pasca Arab Spring menurut El-Khawas¹⁵ menunjukkan bahwa partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat, baik dari kalangan minoritas dan kaum perempuan merupakan faktor

¹⁵ M. A. El-Khawas, "Democratization and Political Participation in Tunisia: Lessons from the Arab Spring", *Journal of Middle East and North Africa Sciences*, 19, no. 2, (2019): 10.

untuk memperkuat proses demokratisasi di Tunisia. El-Khawas menunjukkan bahwa partisipasi politik melalui aktivitas seperti demonstrasi, pemilihan umum, dan aktif di media sosial telah membantu memperkuat demokrasi di Tunisia. Hal tersebut diperkuat oleh analisis yang dilakukan oleh M, Aman M.¹⁶ dalam jurnal *Asian Social Science*. Aman, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi di Tunisia ini diperjuangkan oleh peran dari partai politik dan masyarakat sipil, termasuk usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengubah konstitusi, memperbaiki sistem pemilu, dan meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk menciptakan demokrasi yang inklusif.

Langkah keberhasilan demokratisasi di Tunisia pasca Arab Spring merupakan pilihan yang bijak dalam menjamin kemajuan negara Tunisia. menurut Larry Diamond¹⁷ dalam penelitiannya melihat beberapa langkah penting yang telah diambil pemerintah Tunisia dalam membangun demokratisasi, seperti perubahan konstitusi dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Selain itu, Diamond melihat kontribusi dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam memainkan peran penting membangun demokrasi di Tunisia. Sebagai upaya untuk memperkuat sistem demokrasi yang stabil adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan memastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi secara efektif, terutama dalam keadaan yang tidak stabil dalam bidang ekonomi dan keamanan. Serta pentingnya memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan sipil serta membangun kultur politik yang menghargai kebebasan berpendapat dan pluralisme. Penelitian ini juga diperkuat oleh analisis Yerkes, S.¹⁸ dengan menunjukkan bahwa langkah-langkah penting pemerintah Tunisia dalam mengambil kebijakan untuk membangun demokrasi, seperti perubahan konstitusi, reformasi lembaga keamanan, dan upaya-upaya untuk memerangi korupsi. Selain itu keberhasilan demokrasi di Tunisia juga didukung oleh partisipasi masyarakat

¹⁶ Aman, M. M, "The Evolution of Democracy in Tunisia: Prospects and Challenge," *Asian Social Science*, 11, no. 10, (2015): 5.

¹⁷ Larry Diamond, "Tunisia's Democratization: Progress and Challenges", *Journal of Democracy*, 27, no. 3, (2016): 129-130.

¹⁸ Sarah Yarkes, "Tunisia: Democracy in the Making", *Carnegie Endowment for International Peace*, (2018).

sipil, para aktivis, organisasi hak asasi manusia, dan media. Yerkes juga menyoroti peran penting yang telah dilakukan kaum perempuan dan pemuda dalam proses demokratisasi di Tunisia. Sebagai usaha yang penting dalam memperkuat demokrasi yang stabil adalah dengan memperkuat ekonomi dan mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Mounira Charrad¹⁹ yang membahas mengenai perbandingan antara demokrasi dan otoritarianisme di Tunisia sejak Revolusi. Serta membandingkan Tunisia dengan negara-negara Arab lainnya dan menunjukkan bahwa Tunisia memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara-negara Arab lainnya dalam membangun demokrasi dan mendorong reformasi politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tunisia telah berhasil menuju transisi demokrasi sejak revolusi. Dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia telah diperkuat. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa dalam dinamika demokrasi yang sedang dibangun di Tunisia adanya beberapa praktik otoriter dari masa lalu yang masih ada, seperti, tindakan represif terhadap kritikus pemerintah dan penyebaran informasi palsu untuk mempengaruhi pemilihan umum.

Penelitian-penelitian selanjutnya umumnya menganalisis mengenai kasus otoritarianisme dalam pembangunan demokrasi di Tunisia. Mereka menganalisis berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Tunisia, serta implikasi dari tindakan tersebut terhadap demokrasi di Tunisia. Beberapa penelitian menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Kais Saied dan melihat tindakan tersebut sebagai upaya untuk mengambil alih kekuasaan secara otoriter. Kekhawatiran juga akan berdampak panjang pada masa depan demokratisasi di Tunisia. Namun, beberapa penelitian lain memandang bahwa

¹⁹ Mounira Charrad. "Democracy and Authoritarianism in Tunisia since the Revolution: A Comparative Analysis", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 669, no. 1, (2017): 138-155.

tindakan Saied dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi di Tunisia dengan menyingkirkan korupsi dan memperbaiki kondisi ekonomi yang memburuk. Faktor-faktor yang akan mengembalikan Tunisia pada genggaman otoritarianisme adalah adanya krisis politik dan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik dalam menangani krisis ekonomi, ketidaksepahaman antara partai politik dalam memajukan Tunisia, serta kebijakan yang telah dikeluarkan Saied yang kontroversial, seperti membekukan parlemen dan menguasai kekuasaan eksekutif yang bertentangan dengan nilai demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Posusney dan Angrist²⁰, Argumen utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan kembali otoritarianisme pada pembangunan demokratisasi di Tunisia adalah krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Kembalinya otoritarianisme diperkuat oleh kalangan elit politik dan kekuatan militer dan tidak adanya upaya perbaikan pada krisis ekonomi sehingga menyebabkan penurunan demokrasi dan ketidakstabilan politik. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Khatib²¹, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun Tunisia telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat demokrasi namun harus tetap menyadari hambatan dan tantangan utama dalam membangun negara demokrasi di Tunisia adalah dengan memastikan stabilitas politik dan keamanan, serta memperkuat lembaga-lembaga struktur pemerintahan yang lemah. Hal ini juga telah diteliti oleh Skhiri²² dengan argumen bahwa meskipun Tunisia telah mencapai kemajuan dalam memperkuat demokrasi setelah Revolusi, namun ancaman otoritarianisme masih ada dan menjadi sebuah tantangan yang serius dalam proses transisi demokratis di negara Tunisia. Bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan kembali adalah faktor-faktor terjadinya ketidakstabilan politik, ketidakpuasan masyarakat sipil serta krisis ekonomi yang tidak mampu diatasi dapat menimbulkan dan menjadi ancaman serius otoritarianisme di Tunisia.

²⁰ M. P. Posusney & Angrist, "Authoritarianism and Democratic Breakdown in Tunisia", *Democratization*, 25, no. 4 (2018): 129.

²¹ L. Khatib, "Tunisia's Political Transition: The Challenge of Building a Democratic State", *Journal of International Affairs*, 70 no. 2, (2017): 111-122.

²² Abdelkarim Skhiri, "Transition to Democracy and Threats of Authoritarianism in Tunisia", *Journal of Developing Societies*, 34, no. 2, (2018): 125.

Penelitian yang dilakukan oleh Brownlee dan Masoud²³ ini membahas mengenai tantangan dan keberhasilan Tunisia dalam membangun demokrasi pasca Arab Spring. Argumen dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tunisia telah memperoleh kemajuan signifikan dalam mengonsolidasikan demokrasi, namun masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menghambat usaha dalam memperkuat demokrasi. Brownlee dan Masoud menyatakan bahwa walaupun Tunisia telah melalui perubahan politik yang signifikan, tetapi keberhasilan dalam membangun demokrasi masih memerlukan upaya yang lebih besar. Mereka menyoroti keberhasilan Tunisia dalam membentuk lembaga-lembaga demokratis, seperti pembentukan konstitusi yang progresif dan pemberantasan korupsi. Namun, penulis menekankan bahwa tantangan tetap ada, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, stagnasi ekonomi, dan peran militer yang masih sangat kuat.

Sejalan dengan pembahasan mengenai tindakan Saied yang kontroversial Belhaj²⁴ dalam penelitiannya menganalisis mengenai latar belakang sosial dan politik yang mendorong tindakan Presiden Kais Saied dalam mengeluarkan kebijakannya. Kebijakan yang kontroversial dengan membekukan parlemen dan membentuk pemerintahan baru tanpa berkonsultasi dengan partai politik yang ada merupakan dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang lemah dan korup. Tindakan yang dilakukan oleh Saied didukung oleh banyak orang di Tunisia yang merasa terpinggirkan dan tidak diwakili oleh partai politik yang ada, serta amarah rakyat terhadap para politisi yang dianggap korup. Selain itu Penelitian Bouali²⁵ membahas mengenai perkembangan demokratisasi di Tunisia sejak pasca Arab Spring hingga mencapai krisis politik dengan hasil penelitian adalah bahwa krisis politik di Tunisia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesepakatan dan kerjasama antara partai politik yang ada,

²³ Jason Brownlee & Tarek Masoud, "Tunisia's Democratic Struggle", *Foreign Affairs*, 100, no. 3, (2021): 127.

²⁴ A. Belhaj, "Is Tunisia Heading Toward an Authoritarian Turn?" *Carnegie Endowment for International Peace*. (2021)

²⁵ H. Bouali, "Tunisia's Political Crisis: How Did We Get Here and What Happens Next?", *Open Democracy*, (2021)

kegagalan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial, dan kelemahan institusi demokratis. Bouali juga menyoroti bahwa krisis politik yang terjadi dapat memperburuk situasi ekonomi dan sosial di Tunisia, serta mempengaruhi stabilitas politik di wilayah sekitarnya. Namun, Belhaj mengingatkan bahwa tindakan Saied dalam mengambil alih kekuasaan tanpa mekanisme yang jelas untuk menjamin kontrol dan keseimbangan kekuasaan dapat menimbulkan hambatan dalam membangun demokrasi di Tunisia.

Belhaj juga menyoroti bahwa salah satu tantangan utama bagi demokrasi di Tunisia saat ini adalah membangun sistem politik yang inklusif dan akuntabel. Meskipun Tunisia telah membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, masalah korupsi, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi masih menjadi kendala yang harus diatasi. Dalam konteks ini, tindakan Saied dapat menghambat kemajuan demokrasi di Tunisia jika tidak diarahkan pada reformasi yang komprehensif dan partisipasi yang inklusif dari semua pemangku kepentingan. Menurut Zoubir²⁶, Tunisia menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan demokrasinya pasca Arab Spring, khususnya dalam mengatasi masalah ekonomi dan krisis politik yang terus berlangsung. Selain itu, terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, serta lemahnya sistem hukum dan korupsi yang masih merajalela. Selain itu, pemerintah masih belum mampu mengatasi polarisasi politik yang terjadi, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas negara dan proses demokrasi. Selain itu, adanya kekuatan oposisi yang tidak puas dengan jalannya demokrasi dan mungkin menginginkan perubahan pada sistem pemerintahan, dapat memicu potensi otoritarianisme. Oleh karena itu, Tunisia perlu melakukan reformasi politik dan ekonomi secara terus-menerus untuk menjaga keberlangsungan demokrasinya dan mencegah potensi otoritarianisme.

²⁶ Y. Zoubir, "Tunisia's Democratic Descent", *Project Syndicate*, 26 Februari 2021.

Tindakan Saied yang akan berdampak akan menghambat demokratisasi di Tunisia, dalam penelitiannya Ben Achour, R.²⁷ menganalisis tindakan Presiden Kais Saied yang berpotensi menghambat proses demokratisasi dan mengarahkan Tunisia ke arah otoritarianisme. Penelitian ini memaparkan fakta-fakta dan peristiwa di Tunisia, termasuk tindakan Saied yang membekukan parlemen, memperluas kekuasaan eksekutif, dan mengambil alih sistem peradilan. Ben Achour menekankan bahwa tindakan Saied ini bertentangan dengan konstitusi Tunisia, yang menyediakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa tindakan Saied mengancam stabilitas politik dan ekonomi Tunisia serta memperburuk situasi sosial dan politik di negara ini. Peristiwa yang dilakukan oleh Saied akan berdampak merusak reputasi Tunisia sebagai model demokrasi di dunia Arab, dan dapat mempengaruhi negara-negara lain yang berjuang untuk mencapai demokrasi.

Peristiwa politik ini juga diteliti Labidi, L.²⁸, ia membahas mengenai langkah-langkah Presiden Kais Saied dalam memimpin Tunisia dan bagaimana tindakan Saied mempengaruhi masa depan demokrasi di Tunisia. Artikel ini mencatat bagaimana Presiden Kais Saied telah menggunakan kekuasaannya untuk membekukan parlemen dan mengambil keputusan darurat tanpa konsultasi, termasuk pengangkatan perdana menteri baru dan pemberhentian hakim-hakim yang dianggap korup. Penelitian ini mencatat bahwa tindakan-tindakan ini menyebabkan kekhawatiran mengenai kembalinya otoritarianisme yang mungkin diambil oleh Saied. Selain itu penelitian ini juga membahas kekhawatiran mengenai ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dihadapi Tunisia saat ini, serta dampaknya pada kestabilan regional. Penelitian ini menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga demokrasi serta mendorong dialog nasional untuk memperkuat demokrasi di Tunisia. Argumen

²⁷ R. Ben Achour, "Tunisia's President Kais Saied Is Steering His Country Toward Authoritarianism", *Foreign Policy*, 2021.

²⁸ L. Labidi, "Tunisia's President Is Taking the Country Down an Uncertain Path", *The Conversation*, 28 Juli 2021.

utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Saied telah melangkah ke arah otoritarianisme dan mengambil tindakan yang merugikan lembaga-lembaga demokrasi di Tunisia. Labidi mempertanyakan keputusan Saied dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika demokrasi di Tunisia terus dibenturkan dengan tindakan-tindakan otoriter.

Tindakan otoriter yang dilakukan oleh Saied ini juga dianalisis Sarah Yerkes²⁹, menurutnya Saied telah mengambil tindakan-tindakan yang kontroversial, seperti, melarang partai politik, membubarkan parlemen, dan mengambil kendali atas kekuasaan eksekutif serta dampaknya terhadap proses demokrasi di Tunisia. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa tindakan-tindakan Presiden Saied mengancam proses demokratisasi Tunisia. Yerkes mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti, pembagian kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yerkes juga menyoroti bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat merusak hubungan Tunisia dengan negara-negara investor internasional dan meningkatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Dalam krisis politik yang mengancam masa depan demokrasi di Tunisia diperlukan semua elemen masyarakat dan pemangku kekuasaan dalam menjaganya. Menurut Zoubir pentingnya menjaga demokrasi di Tunisia, mengingat negara ini dianggap sebagai contoh sukses dalam membangun demokrasi di Afrika Utara. Ia menggarisbawahi bahwa upaya pemulihan demokrasi di Tunisia perlu didukung oleh masyarakat internasional, terutama oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Karena menurut, Brownlee dan Masoud menegaskan bahwa aksi Saied tidak berarti Tunisia akan kembali ke masa lalu yang otoriter, melainkan menandakan bahwa proses demokratisasi di Tunisia masih belum selesai dan masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih besar.

²⁹ Stephan L. Yarkes, "Tunisia's Crisis: Democracy on the Brink", *Brookings Institution*, 20 Juli 2021

Dari kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa pembangunan transisi demokrasi di Tunisia telah dianggap berhasil jika dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, dengan usaha yang dilakukannya pasca revolusi. Namun, tantangan dan hambatan dalam pembangunan demokrasi di Tunisia masih perlu menjadi perhatian yang serius, seperti tindakan yang dilakukan oleh Presiden Kais Saied yang menuai kekhawatiran akan mengembalikan Tunisia ke dalam genggaman otoriter.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada proses dinamika pembangunan demokratisasi di Tunisia pada masa pemerintahan Presiden Kais Saied dengan menggunakan teori Robert Dahl untuk mendeskripsikan elemen-elemen demokrasi di satu sisi. Sisi lain penelitian ini menggunakan teori otoritarianisme dari Stevan Levitsky dan Danial Ziblatt untuk melihat tindakan Presiden Kais Saied yang melawan dari pengertian demokrasi pada umumnya. Walaupun hal ini bersebrangan tetapi teori digunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kesiapan pemerintah dalam proses demokrasi dilihat dari lembaga-lembaga yang mempresentasikan demokrasi di era modern. Serta melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi Presiden Saied dalam memberlakukan pembekuan parlemen dan mencabut jabatan Perdana Menteri dilanjut dengan tindakan represif dari aparat yang menekan pada kebebasan berekspresi. Sehingga penelitian ini mengkaji apa faktor dari keputusan Presiden Saied dan apakah dampaknya pada pembangunan demokrasi di Tunisia. Apakah Tunisia akan menjadi contoh dari kemunduran demokrasi bagi negara-negara lain yang sedang bertransisi ke sistem demokrasi.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan teori otoritarianisme. Pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat masyarakat secara kolektif. Umumnya demokrasi memberikan peran aktif rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik serta pemilihan pemimpin melalui mekanisme yang

transparan dan adil. Sedangkan pengertian otoritarianisme adalah sebuah sistem pemerintahan yang ditandai oleh kekuatan politik dari individu atau kelompok kecil yang memiliki kekuasaan tunggal tanpa adanya kontrol dari rakyat. Penelitian ini juga menggunakan teori relativisme budaya untuk melihat konteks budaya Tunisia jika disandingkan dengan demokrasi.

Pada penelitian ini, menggunakan teori demokrasi menurut Robert E. Dahl untuk melihat pembangunan demokrasi di Tunisia yang sedang mengalami ancaman karena Presiden Kais Saied dengan kekuasaannya membekukan parlemen dan mencabut jabatan Perdana Menteri, yang mana ini mematikan fungsi dari perwakilan yang mempresentasikan masyarakat Tunisia. Teori demokrasi menurut Dahl digunakan sebagai fondasi dan unsur-unsur dari prinsip demokrasi yang ada dalam sistem pemerintahan di Tunisia.

a. Demokrasi menurut Robert E. Dahl

Menurut Dahl, terdapat tiga karakteristik demokrasi yang dapat bermanfaat secara operasional, yaitu keadilan umum (*populer sovereignty*), kesetaraan politik (*political equality*), dan pemerintahan oleh mayoritas (*majority rule*). Selanjutnya, karakteristik tersebut dibagi menjadi delapan unsur yang lebih spesifik yang mencerminkan sistem demokrasi sebagai berikut,

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul),
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat),
3. Hak memilih dan dipilih,
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik,
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi dalam mendapatkan dukungan atau memberi dukungan,
6. Alternatif sumber-sumber informasi,
7. Pemilu yang bebas dan adil,

8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.³⁰

Dahl juga mencoba mengklasifikasikan demokrasi dalam dua bentuk, yaitu demokrasi substatif dan demokrasi prosedural atau istilah Dahl poliarki. Yang dimaksud dengan demokrasi substantif adalah demokrasi yang membawa prinsip dan nilai-nilai demokratis dalam tatanan praktis. Sedangkan demokrasi prosedural lebih menekankan pada kemerdekaan rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya, dalam demokrasi prosedural, pemilihan pemimpin dan wakil rakyat dilaksanakan melalui pemilu.

Dalam konteks pembangunan demokratisasi di Tunisia pasca Arab Spring, teori Dahl dapat diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana proses transisi menuju demokrasi berjalan dengan baik. Salah satu hal yang perlu dievaluasi menurut Dahl adalah apakah proses pemilihan umum yang diadakan setelah Revolusi benar-benar kompetitif, terbuka dan adil, serta apakah partisipasi masyarakat dalam proses politik sudah terjamin. Selain itu, melihat pada aspek perlindungan hak-hak individu yang perlu dievaluasi, seperti kebebasan pers, hak minoritas, dan hak asasi manusia secara umum. Hal ini sejalan dengan konsep poliarki yang dikemukakan oleh Dahl, di mana sebuah sistem politik yang demokratis harus mampu melindungi hak-hak individu secara menyeluruh.

- b. Teori Otoritarianisme menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt

Dalam buku yang berjudul *How Democracies Die*, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menuliskan beberapa indikator yang dapat mengidentifikasi kemungkinan kembalinya otoritarianisme di suatu negara yang sebelumnya demokrasi. Levitsky dan Ziblatt membagi indikatornya ke dalam lima sikap, sebagai berikut³¹;

³⁰ Robert Dahl, "Poliarki: Partisipasi dan Oposisi", (London: Yale University Press, 1971), 7.

³¹ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, "How Democracies Die", (New York: Crown Publishing Group, 2018), 22-23.

1. Penolakan terhadap peraturan demokrasi, otoritarianisme sering muncul ketika pemimpin-pemimpin politik menolak aturan demokrasi, baik berupa hukum dan kebebasan pribadi.
2. Penguasaan penuh terhadap media, pemerintah otoriter sering menekan kebebasan pers dan mengekang informasi yang bertentangan dengan kepentingan elite politik. Levitsky menyatakan bahwa ketika media tidak bebas itu menjadi tanda bahwa pemerintah tidak memberikan hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak dasar.
3. Ketidaktertarikan terhadap hak minoritas, Levitsky menyatakan bahwa ketika pemerintah mengabaikan hak minoritas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memberikan kebebasan dan hak asasi manusia secara umum.
4. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, pemerintah otoriter sering menggunakan kekerasan serta ancaman yang intimidatif terhadap warganya untuk mengendalikan kekuasaan.
5. Penggunaan hukum dan sistem peradilan untuk melawan oposisi, pemerintah otoriter menggunakan sistem peradilan untuk menentang dan menghukum mereka yang dianggap mengancam kepentingan pemerintah.

Dengan munculnya salah satu dari indikator di atas tersebut, berarti menunjukkan peringatan negara bahwa kemunduran demokrasi yang serius sedang terjadi. Dalam konteks Tunisia saat ini, teori Levitsky dan Ziblatt ini dapat membantu dalam memahami kemungkinan kembalinya otoritarianisme dan bagaimana mencegahnya. Perlunya kerja sama antara pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan masyarakat sipil di Tunisia dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, memperbaiki hak asasi manusia, dan memastikan kebebasan pers serta kebebasan sipil bagi semua warga negara.

c. Relativisme Budaya

Relativisme budaya merupakan pemikiran yang berangkat dari gagasan umum yang menyatakan bahwa karakter budaya atau moral bersifat relatif. Pemikiran ini berangkat dari antitesa terhadap konsep universalisme hak asasi

manusia Internasional yang menyatakan bahwa universalisme merupakan dominasi budaya Barat. Bagi relativisme budaya, hak asasi manusia harus disesuaikan dengan kondisi kebudayaan masing-masing masyarakat. Menurut Jack Donnelly, gagasan mengenai relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.³² Konsep tentang hak asasi manusia harus disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing wilayah sebagai antitesa konsep universalisme diusung oleh negara berkembang, negara Islam dan negara dunia ketiga pada dasawarsa 1990-an.³³

Secara sederhana relativisme budaya dapat diartikan sebagai penolakan atas konsep universalisme yang akan merusak keragaman budaya dan membentuk budaya menuju satu dunia modern. Universalisme mengidentifikasi bahwa kebudayaan di semua wilayah sama dengan wilayah lainnya dengan konsep Barat. Sedangkan relativisme budaya menyatakan bahwa kebudayaan harus disesuaikan dan disandingkan pada konteks masing-masing wilayah.

Menurut Huntington, perbedaan kekuasaan, perubahan kekuasaan militer, ekonomi dan institusional merupakan salah satu sumber konflik antara Barat dan peradaban lain. Sedangkan konflik selanjutnya pada perbedaan budaya terletak pada nilai-nilai dasar dan kepercayaan. V. S. Naipul menyatakan bahwa peradaban Barat adalah peradaban universal yang cocok untuk semua wilayah. Pada tingkat yang dasar, sebagian besar budaya Barat memang telah meresap ke seluruh dunia. Namun, pada tingkat yang lebih mendasar, konsep-konsep Barat berbeda secara fundamental dari konsep-konsep yang umum di peradaban lain. Seperti ide-ide Barat mengenai individualisme, liberalisme, hak asasi manusia, konstitusionalisme, kebebasan dan demokrasi sering kali bertentangan dengan budaya-budaya Islam, Konghucu, Jepang, Hindu, atau Ortodoks.

Upaya Barat dalam menyebarkan ide-ide universalisme semacam itu bereaksi melawan imperialisme hak asasi manusia dan penegasan kembali nilai-

³² Jack Donnelly, "Universak Human Rights in Theory and Practice", (Cornell University Press Ithaca and London, 2003), 89-93.

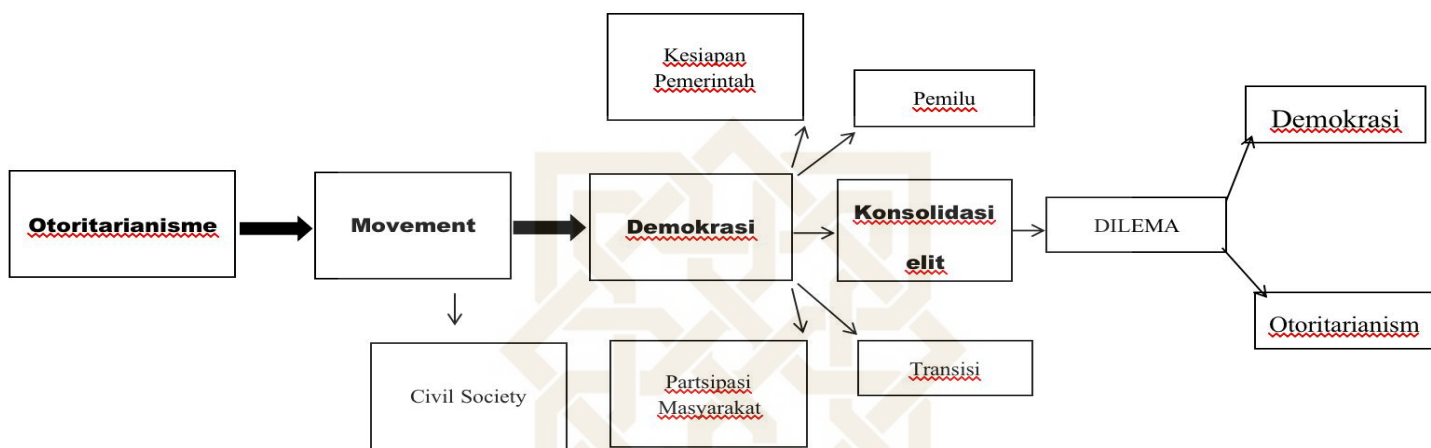
³³ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), 19.

nilai asli, seperti yang dapat dilihat pada dukungan terhadap fundamentalisme agama oleh generasi muda dalam budaya non-Barat. Gagasan bahwa mungkin ada peradaban universal adalah gagasan Barat, yang secara langsung bertentangan dengan partikularisme sebagian besar masyarakat Asia dan penekanan mereka pada apa yang membedakan satu orang dengan yang lain. Di bidang politik, tentu saja perbedaan-perbedaan ini paling nyata dalam upaya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya untuk mendorong mengadopsi gagasan-gagasan Barat tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Sangat jelas bahwa pemerintahan demokratis modern berasal dari Barat, ketika konsep tersebut berkembang pada masyarakat non-Barat, biasanya merupakan hasil dari kolonialisme atau pemaksaan Barat.

Poros utama konflik antara peradaban nilai-nilai Barat dan tanggapan non-Barat terdapat tiga bentuk. Pertama, negara-negara yang melakukan isolasi, mengisolasi masyarakat mereka dari penetrasi atau korupsi oleh Barat, yang pada dasarnya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam komunitas global yang didominasi oleh Barat. Namun langkah pertama harus menempuh biaya yang cukup tinggi, dan hanya sedikit negara yang menerapkan secara eksklusif, seperti Burma dan Korea Utara. Kedua, bergabung dengan Barat dan menerima nilai-nilai dan institusi-institusinya. Ketiga, penyeimbangan Barat dengan mengembangkan kekuatan ekonomi dan militer dan bekerjasama dengan masyarakat non-Barat lainnya untuk melawan Barat, sambari tetap melestarikan nilai-nilai dan institusi pribumi; singkat, memodernisasi tetapi tidak untuk membarat-baratkan.

Teori relativisme budaya digunakan untuk melihat proses demokratisasi di Tunisia dengan melihat elemen-elemen demokrasi apakah menunjukkan kesamaan dengan definisi demokrasi di Barat atau demokrasi diartikan dalam konteks budaya di Tunisia dengan mayoritas penduduk Muslim dan berbudaya Arab.

Kerangka Konsep



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan mengenai dengan sifat, ciri, nilai-nilai (ideologi dan sikap orang), keadaan dan kondisi. Dengan begitu peneliti mengkaji keputusan Presiden Kais Saied membekukan parlemen dan mencabut jabatan perdana menteri yang mengancam pembangunan demokrasi di Tunisia dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Peneliti juga menggunakan kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah postmodernisme dengan melihat bahwa kebudayaan itu bersifat relative artinya, realitas sosial, budaya dan institusi sosial sangat tergantung pada konteks dan pandangan yang berbeda.

2. Sumber dan Data

Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengetengahkan fakta terkait keputusan Presiden Kais Saied membekukan parlemen dan mencabut jabatan perdana menteri yang mengancam pembangunan demokrasi di Tunisia yang berupa Dekrit 25 Juli 2021, UU Konstitusi 2014 dan 2022, serta laporan Hak Asasi Manusia Tunisia 2022. Selain itu dikarenakan objeknya bersifat tematik maka sumber yang digunakan berupa berita baik media visual maupun majalah, jurnal, artikel dan buku.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah berupa artikel atau buku yang membahas mengenai isu-isu demokrasi di kawasan Timur Tengah.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Inventarisasi literatur

Inventarisasi literatur merupakan suatu proses pengumpulan dan pencatatan literatur yang berkaitan dengan suatu topik tertentu. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti kebaruan, relevansi, dan kualitas literatur. Yaitu, suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mencatat literatur yang berkaitan dengan suatu topik tertentu. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa literatur yang dikumpulkan adalah relevan dan berkualitas.

b. Pengkajian data dan literatur

Pengkajian data dan literatur adalah dua langkah penting dalam penelitian atau kajian apapun. Keduanya melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk membangun pemahaman yang kuat tentang topik yang diteliti. Merupakan dua proses yang saling terkait dalam penelitian atau kajian. Pengkajian data mengacu pada proses mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik penelitian. Pengkajian literatur mengacu pada proses mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tersedia dalam literatur yang ada tentang topik penelitian.

c. Pencatatan data dan pengeditan

Pencatatan data dan pengeditan merupakan proses pencatatan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses ini dilakukan untuk memudahkan akses dan pencarian data di masa mendatang. Proses yang penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat digunakan untuk analisis. Proses ini meliputi pencatatan data secara lengkap dan tepat, serta pengeditan data untuk menghilangkan kesalahan atau ketidakkonsistenan.

d. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu. Proses ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan interpretasi data. Proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu. Proses ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan interpretasi data.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data melalui abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan penting. Setelah itu, data-data disusun dalam satuan-satuan yang kemudian dibuat kategori tertentu. Tahap akhir dari analisis data adalah memeriksa keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, peneliti mulai melakukan penafsiran data dan mengolah hasil sementara menjadi tori substantif dengan menggunakan metode kajian isi (*content analysis*).³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dari lima bab, dengan bab pertama yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab dua berisi mengenai bagaimana pembangunan demokratisasi di Tunisia pada masa Presiden Kais Saied. Dilihat dari tindakan Presiden Kais Saied dalam Proses demokrasi di Tunisia dimulai dari terpilihnya Kais Saied 2019 hingga tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, untuk melihat harapan dan tantangan demokrasi.

Bab tiga selanjutnya membahas mengenai demokratisasi di Tunisia dilihat dari perguluman paradigma klasik dan modernisme berdasarkan Konstitusi Tunisia dan kebijakan yang telah diberlakukan.

Pada bagian keempat akan membahas kebijakan politik dalam *structuring structur* dalam pembangunan demokrasi di Tunisia. Bab ini akan melihat

³⁴ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (PT Remaja Rosdakarya, 2010), 247.

bagaimana Tunisia dalam membangun demokrasi dipengaruhi oleh budaya, agama dan warisan kolonial.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[saied-urged-to-resign-after-lowest-turnout-ever//](#) diakses 6 Juni 2023

Akurat.CO. Imbas Presiden dan Perdana Menteri Tak Akur, Tunisia Dilanda Demo Besar-besaran. Februari 2021.
<https://akurat.co/imbaspresiden-dan-perdana-menteri-tak-akur-tunisia-dilanda-demo-besar-besaran?page=all> diakses 27 Mei 2023.

Al Jazeera. Tunisia presidential election: Kais Saied declared winner. Oktober 2019.
<https://www.aljazeera.com/news/2019/10/14/tunisia-presidential-election-kais-saied-declared-winner> diakses 26 Mei 2023.

Al-Araby. صالحاً يعد لم 2014 دستور: سعيد قيس التونسي الرئيس. dikutip
<https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2014-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8B>
 diakses 29 Mei 2023.

Al-Bawsala (2013) About Us. Akses di
<http://www.albawsala.com/en/presentation>

Aljazeera. Tunisia: Mass anti-Saied protests take place in capital Tunis. Maret 2022. dikutip <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/20/tunisia-mass-anti-saied-protests-take-place-in-capital-tunis> diakses 29 Mei 2023.

Al-Qabd 'ala al-na'ib 'an hizb 'Tahya Tounes' Lotfi Ali [The arrest of the deputy of the 'Tahya Tounes' party, Lotfi Ali], al-Araby al-Jadid, Augustus 21, 2021.

Amnesty International, "Tunisia: Dissolution of Top Judicial Body Threatens Human Rights", 25 February 2022. Available online at: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/5269/2022/en/>

Anton Suhartono, "Perdana Menteri Tunisia Elyes Fakhfakh Mengundurkan Diri, Picu Krisis Politik. *INews* (Jakarta, 2021).

Arab Barometer Wave V." Dataset, 2019. <https://www.arabbarometer.org/surveys/arab-barometer-wave-v/>

Atlantic Council. (2021). Experts react: What's next after Tunisian president's parliamentary.

BBC News. Tunisia referendum: Voters give president near unchecked power. Juli 2022. dikutip <https://www.bbc.com/news/world-africa-62314305> diakses 29 Mei 2023

Bernard Lewis. (1990) "The Roots of Muslim Rage," Atlantic Monthly, February. Akses in:

<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-muslim-rage/304643/>

Bouali, H. (2021). *Tunisia's Political Crisis: How Did We Get Here and What Happens Next?* Al Jazeera.

Brookings. 'Kais Saïed's power grab in Tunisia. Juli 2021. ddikutip dari <https://www.brookings.edu/articles/kais-saieds-power-grab-in-tunisia/> diakses 27 Mei 2023.

Business News, Kaïs Saïed : j'éliminerai les élections législatives et je suis pour la peine de mort. November 2011. <https://www.businessnews.com.tn/Ka%C3%AFs-Sa%C3%AFed--j%E2%80%99%C3%A9liminerai-les-%C3%A9lections-l%C3%A9gislatives-et-je-suis-pour-la-peine-de-mort%2C520%2C88453%2C3> diakses 23 Mei 2023.

CF Tunisia. Décret-loi n° 2022-32 du 25 mai 2022, portant dispositions dérogatoires pour le référendum du 25 juillet 2022. dikutip <https://legislation-securite.tn/law/105265> diakses 29 Mei 2023.

Courrier International, Élections. Qui est Kais Saïed, le gagnant de la présidentielle en Tunisie. September 2019. <https://www.courrierinternational.com/article/elections-qui-est-kais-saied-le-gagnant-du-premier-tour-de-la-presidentielle-en-tunisie> diakses 24 Mei 2023.

DCAF Tunisia. Décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure

indépendante pour les élections. dikutip <https://legislation-securite.tn/law/105252> diakses 15 Juni 2023.

DCAF Tunisia. Décret-loi n° 2022-30 du 19 mai 2022, relatif à la création de “l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République”. dikutip <https://legislation-securite.tn/law/105267> diakses 29 Mei 2023

DCAF Tunisia. Décret-loi n° 2022-35 du 1er juin 2022, complétant le décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature. Juni 2022. dikutip <https://perma.cc/L8KP-WJQW> diakses 7 Juni 2023

DCF Tunisia. Décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, portant modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums. dikutip <https://perma.cc/24JP-RA4P> diakses 2 Juni 2023.

DCF Tunisia. Décret Présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022 dikutip <https://legislation-securite.tn/law/105266> diakses 29 Mei 2023.

Election Guide. Pemilihan Kursi Parlemen 2011. <https://www.electionguide.org/elections/id/1608/> diakses 5 Juni 2023.

Election Guide. Pemilihan Kursi Parlemen 2014. <https://www.electionguide.org/elections/id/2746/> diakses 5 Juni 2023

Election Guide. Pemilihan Kursi Parlemen 2019. <https://www.electionguide.org/elections/id/3175/> diakses 5 Juni 2023.

Election Guide. Pemilihan Presiden 2019 Putaran Pertama. <https://www.electionguide.org/elections/id/3398/> diakses 5 Juni 2023.

Emna Ben Arab, In Tunisia, Civil Society Is Back in the Trenches, University of Sfax. <https://www.ispionline.it/en>

En Tunisie, des jeunes épris de changement font campagne pour Kais Saied, Oktober 2019. <https://www.rtl.be/actu/en-tunisie-des-jeunes-epri-de-changement-font-campagne-pour-kais-saied/2019-10-09/article/253505> diakses 24 Mei 2023.

Euro Med Human Monitor. Tunisia: Journalists receive threats for covering political crisis events. Maret 2022. dikutip <https://euromedmonitor.org/en/article/5025/Tunisia:-Journalists-receive-threats-for-covering-political-crisis-events> diakses 29 Mei 2023.

European Forum for Democracy and Solidarity (2014) Tunisia Country Update. akses in : <http://www.europeanforum.net/country/tunisia>

Facebook post, Official Facebook page of the Tunisian President's Office, 5 February 2022. Available online at: <https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/330334598837172/>; International Commission of Jurists, Tunisia: Stop

attacks on the judiciary”, 7 December 2021. Available online at:

<https://www.icj.org/tunisia-stopattacks-on-the-judiciary/>

Foreign Policy. Kais Saied’s Proposed New Constitution Is Roiling Tunisia. Juli 2022. dikutip

<https://foreignpolicy.com/2022/07/06/tunisia-draft-constitution-kais-saied-proposed-new-constitution-democracy/> diakses 29 Mei 2023.

Foundation for Research and Development. 2014, akses di:

<http://www.jasmine-foundation.org/en/?p=644>

Global Voice. Tunisia: New prosecutions resurrect shadow of dictatorship. Desember 2021. dikutip

<https://globalvoices.org/2021/12/16/tunisia-new-prosecutions-resurrect-shadow-of-dictatorship/> 23 Mei 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=hPdpPZ5F4OU>

Human Right Watch. Q&A: Tunisia’s Constitutional Referendum. Juli 2022. dikutip <https://www.hrw.org/news/2022/07/14/qa-tunisia-constitutional-referendum#Q1>

diakses 6 Juni 2023.

Human Right Watch. Tunisia: Questions and Answers on the Draft Constitution. Juli 2022. dikutip

<https://www.hrw.org/news/2022/07/14/tunisia-questions-and-answers-draft-constitution> diakses 29 Mei 2023.

Human Rights Watch. Tunisia Events of 2022. dikutip

<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/tunisia> diakses 29 Mei 2023.

International Commission of Jurists. Fundamentally flawed: Tunisia's 'constitution-making' process. Juni 2022. dikutip

<https://www.icj.org/fundamentally-flawed-tunisia-constitution-making-process/> diakses 29 Mei 2023

ISIE extends candidate filing for legislative elections to October 27.

dikutip <https://www.tap.info.tn/en/Portal-Politics/15671651-isie-extends> diakses 3 Juni 2023.

Jasmine Foundation. Daily Follow-Up of the Constitution Debate.

Jasmine Foundation for Research and Development. 2014.

Akses di: <http://www.jasmine-foundation.org/en/?p=644>

Kais Saied: Tunis satasta'id mukanatha wa lan takun laqma sa'ifa

[Kais Saied: Tunisia will regain its position and will not be up for grabs]. Independent Arabic. 9 Agustus 2021.

Keputusan Lembaga ISIE dalam mengatur jadwal pemilu

https://web.facebook.com/photo?fbid=394107129422254&set=pcb.394107299422237&_rdc=1&_rdr v

Koestanto, "Presiden Pecat Menetri Pertahanan, Tunisia Terancam Pertikaian Bersenjata."

La Presse. Législatives: la majorité des femmes tunisiennes n'a pas été au rendez-vous. Oktober 2019.

<https://lapresse.tn/27941/legislatives-la-majorite-des-femmes-tunisiennes-na-pas-ete-au-rendez-vous/> diakses 26 Mei 2023.

MEMO. Tunisia Labour Union criticises President Saied's exclusion of national participation on reforms. Maret 2022. dikutip

<https://www.middleeastmonitor.com/20220322-tunisia-labour-union-criticises-president-saieds-exclusion-of-national-participation-on-reforms/> diakses 29 Mei 2023.

Michael Safi. (2019). Tunisia election: 'Robocop' Kais Saied wins presidential run off. The Guardian.

Monai Ben Hmadi dan Nissim Gasteli, Tunisian President Kais Saied calls criticism of his repressive policies 'lies', 4 Mei 2023. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/05/04/tunisian-president-kais-saied-calls-criticism-of-his-repressive-policies-lies_6025411_124.html

Mustafa Abd Rahman, Melihat Demokrasi di Tunisia, 9 Juni 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/09/melihat-demokrasi-di-tunisia>

North Africa Post, Right watchdogs: Tunisian President's actions threaten press freedom, 29 Desember 2022. <https://northafricapost.com/63956-rights-watchdogs-tunisian-presidents-actions-threaten-press-freedom.html>

Pemimpin redaksi surat kabar Tunigate, Wejdan Bouabdallah <https://euromedmonitor.org/en/article/5025/Tunisia:-Journalists-receive-threats-for-covering-political-crisis-events>

Perpres pemberhentian jabatan 57 hakim <https://perma.cc/YY5F-AX4J>

Redaction Africanews, Tunisia: Journalists protest in Tunis over press freedom, 22 Mei 2023.

<https://www.africanews.com/2023/05/22/tunisian-journalists-protest-in-tunis-over-press-freedom//>

Reduction des prix de plusieurs produits, La Presse de Tunisie, 1 Agustus 2021, <https://lapresse.tn/102040/reduction-des-prix-deplusieurs-produits/>.

Reporting Under the Weight of Fear': Restrictions on the media in Tunisia under the president's exceptional measures (25 July 2021 – 15 April 2022).

[https://euromedmonitor.org/en/article/5121/'Reporting-Under-the-Weight-of-Fear':-Restrictions-on-the-media-in-Tunisia-under-the-president's-exceptional-measures-\(25-July-2021-%E2%80%93-15-April-2022\)](https://euromedmonitor.org/en/article/5121/'Reporting-Under-the-Weight-of-Fear':-Restrictions-on-the-media-in-Tunisia-under-the-president's-exceptional-measures-(25-July-2021-%E2%80%93-15-April-2022)) diakses 27 Mei 2023.

Reuters, “Tunisia’s president says he will call constitutional referendum, elections next year”, 13 December 2021. Available online at: <https://www.reuters.com/world/africa/tunisia-president-announces-referendumelections-2021-12-13/>

RFI reporter among those brutally attacked by police at Tunisian protest. Januari 2022. dikutip dari

<https://www.rfi.fr/en/africa/20220117-rfi-reporter-among-those-brutally-attacked-by-police-at-tunisian-protest-mathieu-galtier> diakses 28 Mei 2023.

RFI Tunisia. RFI reporter among those brutally attacked by police at Tunisian protest. JANUARI 2022. dikutip

<https://www.rfi.fr/en/africa/20220117-rfi-reporter-among-those-brutally-attacked-by-police-at-tunisian-protest-mathieu-galtier> diakses 10 Juni 2023

Rorisang Lekalake. Beyond the Arab Spring: Will economic and security challenges further test Tunisia's democracy?

Sadiki, L. Tunisia: Tamarrod by Assasination? *Al-Jazeera English*. 27 July, 2013

Samaro, M. F. and D. (2021). Tunisia's protests and the slippery slope to censorship and repression. Accessnow. <https://www.accessnow.org/tunisia-protests/>

Sarah Anne Rennick, "Has Tunisia's Democracy Failed to Convince Its Youth? The Slow-Going of Democratic Socialization," Bawader (Arab Reform Initiative, 24 Agustus 2021).

Taraju' nisbat al-tadhakhum fi tunis khilal shahr 'ut"[Inflation rate in Tunisia declined in August], Mosaique FM, September 5, 2021

The Arab Weekly. The many faces of Kais Saied. <https://the arabweekly.com/many-faces-kais-saied> diakses 26 Mei 2023

The Markaz. Tunisia—Towards the End of the Dream of Democrac. Agustus 2022. dikutip <https://themarkaz.org/tunisia-towards-the-end-of-the-dream-of-democracy/> diakses 28 Mei 2023.

The Tahrir Intitute for Middle East Policy. The Path to Tunisia's 2022 Constitutional Referendum. Juli 2022. dikutip <https://timep.org/2022/07/19/the-path-to-tunisias-2022-constitutional-referendum/> diakses 29 Mei 2023.

Tunisia: Journalists attacked by security forces while covering a demonstration, <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/tunisia-journalists-attacked-by-security-forces-while-covering-a-demonstration>

Tunisia: President's moves to shut down High Judicial Council pose grave threat to human rights, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/tunisia-presidents-moves-to-shut-down-high-judicial-council-poses-grave-threat-to-human-rights/>

Tunisian Party Leader Fined \$7 Million for Customs Violations,” The Arab Weekly, April 16, 2021, <http://thearabweekly.com/tunisian-party-leader-fined-7-million-customs-violations>.

Tunisie Numérique. <https://www.youtube.com/watch?v=hPdPZ5F4OU> diakses 29 Mei 2023.

Wabmanager Center. Législatives 2019 : Vers l'annonce des résultats préliminaires mercredi 9 Octobre. Oktober 2019. <https://www.webmanagercenter.com/2019/10/08/439763/legislatives-2019-vers-lannonce-des-resultats-preliminaires-mercredi-9-octobre/> diakses 26 Mei 2023.

Webdo. Tunisie : Le calendrier électoral des législatives publié dans le JORT. September 2022. dikutip <https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/tunisie-le->

[calendrier-electoral-des-legislatives-publie-dans-le-jort/131043](#) diakses 2 Juni 2023.

الحكومة رئيسة رمضان، بون نجلء السيدة مع سعيد قيس الجمهورية رئيس لقاء
<https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/345736054090981/>

